

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era otonomi daerah yang ditandai dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 mengatur mengenai kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan diarahkan untuk mempercepat kesejahteraan rakyat, termasuk kewenangan untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah sendiri. Daerah otonom mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, mendefinisikan anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode. Menurut Freeman (2003) dalam (Nordian, 2007: 19), anggaran adalah sebuah proses yang dilakukan oleh

organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya pada kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas (*the process of allocating resources to unlimited demands*). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi (Nordiawan dkk, 2007: 39).

Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, belanja modal merupakan bagian dari kelompok belanja daerah, yang memiliki pengertian berupa pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Dengan adanya belanja modal diharapkan adanya *multiplier effect*, secara makro dan mikro bagi perekonomian nasional Indonesia, dan khususnya bagi daerah.

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 pasal 157 tentang Keuangan Daerah, salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Peningkatan PAD diharapkan dapat meningkatkan investasi belanja modal daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik. Sedangkan sumber kekurangan pendanaan diharapkan dapat digali melalui Pendapatan Asli Daerah. Setiap penyusunan APBD, alokasi belanja modal harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan PAD yang diterima. Sehingga apabila Pemda ingin meningkatkan belanja modal untuk pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, maka Pemda harus menggali PAD yang sebesar-besarnya.

Kemampuan suatu daerah untuk membiayai kegiatan operasional berbeda-beda, sehingga untuk mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah tersebut Pemerintah Pusat memberikan bantuan dalam bentuk Dana Perimbangan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Menurut UU No. 32 Tahun 2004 perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi dengan mempertimbangkan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dalam UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah

Daerah juga menegaskan daerah memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumber dana ke dalam belanja-belanja dengan menganut asas kepatuhan, kebutuhan, dan kemampuan daerah.

Dana perimbangan terbagi atas Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada Pemerintah Daerah untuk dikelola dan digunakan secara efektif dan efisien oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada publik. Dana Perimbangan merupakan dana yang dimaksudkan untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan merupakan prioritas nasional, sesuai dengan fungsi yang merupakan perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu, khususnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat untuk dapat meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan dalam belanja modal. Dengan adanya pengalokasian dana perimbangan diharapkan dapat mempengaruhi pengalokasian anggaran belanja modal.

Analisis rasio keuangan merupakan perbandingan antara dua angka yang datanya diambil dari elemen laporan keuangan (Mahmudi, 2011: 162-163). Menurut Halim (2007: 231), analisis rasio keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan yang tersedia. Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya, sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Rasio keuangan dapat

digunakan untuk menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, mengukur efisiensi dan efektifitas dalam merealisasikan pendapatan daerah, mengukur sejauh mana aktifitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya, mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah, melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Riko Novianto dan Rafiudin Hanafiah (2015) tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah tahun penelitian yaitu tahun 2010-2014, penambahan variabel independen yaitu derajat desentralisasi dan ketergantungan keuangan daerah serta lokasi penelitian yaitu pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis memilih judul “PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN DAN KINERJA KEUANGAN TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2014)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal?
2. Apakah terdapat pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Alokasi Belanja Modal?
3. Apakah terdapat pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Alokasi Belanja Modal?
4. Apakah terdapat pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal?
5. Apakah terdapat pengaruh Derajat Desentralisasi terhadap Alokasi Belanja Modal?
6. Apakah terdapat pengaruh Rasio Ketergantungan Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal?
7. Apakah terdapat pengaruh Rasio Efektivitas terhadap Alokasi Belanja Modal?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris pada:

1. Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap alokasi belanja modal.
2. Pengaruh dana bagi hasil terhadap alokasi belanja modal.

3. Pengaruh dana alokasi umum terhadap alokasi belanja modal.
4. Pengaruh dana alokasi khusus terhadap alokasi belanja modal.
5. Pengaruh derajat desentralisasi terhadap alokasi belanja modal.
6. Pengaruh rasio ketergantungan keuangan terhadap alokasi belanja modal.
7. Pengaruh rasio efektivitas terhadap alokasi belanja modal.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan mengenai alokasi belanja modal pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.

2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan akuntansi sektor publik yang berkaitan dengan pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal.

3. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mengalokasikan

belanja modal dan mengoptimalkan potensi lokal yang dimiliki pemerintah Provinsi Jawa Barat, sehingga dapat meningkatkan pelayanan publik.

4. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya dan sebagai penambah wacana keilmuan.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran penelitian yang lebih jelas dan sistematis, agar mempermudah bagi pembaca dalam memahami penulisan penelitian ini. Dari masing-masing bab secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan tentang teori-teori yang mendeskripsikan teoritis variabel penelitian, kerangka pemikiran, serta pengembangan dan perumusan hipotesis.

BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang dasar dilakukannya penelitian, desain penelitian, populasi dan sampel yang diteliti,

jenis data dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan pengukuran, serta metode analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini membahas mengenai data yang digunakan, pengolahan data, gambaran umum analisis data, hasil analisis dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V: PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian serta saran-saran yang dapat bermanfaat bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan di kemudian hari.